

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis politik anggaran dalam proses penetapan kebijakan pembangunan Alun-Alun Kota Depok tahun 2020. Pembangunan Alun-Alun ini merupakan salah satu dari sepuluh janji kampanye Walikota dan Wakil Walikota terpilih, yang menjadi dasar dalam perencanaan dan alokasi anggaran. Meskipun ada upaya untuk transparansi dan akuntabilitas, masih terdapat kendala dalam proses birokrasi dan perencanaan teknis. Dampak positif dari pembangunan ini terlihat dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dan aktivitas ekonomi lokal. Tantangan dalam aspek politik, administratif, dan teknis perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan proyek pembangunan dan memenuhi janji kepada masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai pembangunan yang efektif dan efisien, diperlukan perencanaan anggaran yang lebih optimal, transparan, dan responsif terhadap berbagai kendala yang mungkin muncul selama pelaksanaan proyek:

Politik anggaran dalam mendukung pembangunan Alun-Alun Kota Depok yakni perencanaan politik anggaran dimulai dari janji kampanye yang diproses melalui rapat paripurna oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Depok. Dana untuk pembangunan Alun-Alun berasal dari anggaran ruang terbuka hijau sebesar Rp. 360 miliar, yang disusun berdasarkan standar biaya umum Peraturan Walikota Depok. Realisasi anggaran ini ditujukan untuk mewujudkan kota yang hijau dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Proses penyusunan dan penggunaan anggaran masih menghadapi kendala dalam hal transparansi dan optimalisasi perencanaan. Meskipun ada laporan pertanggungjawaban tahunan, masyarakat hanya mengetahui total anggaran melalui media, bukan detail teknisnya.

Dampak kebijakan pembangunan yakni dampak Sosial, Alun-Alun berfungsi sebagai *landmark* kota, menyediakan ruang publik yang luas untuk berbagai aktivitas masyarakat, meningkatkan kualitas hidup dan kebanggaan warga. Alun-Alun juga memperkenalkan Kota Depok kepada masyarakat luar, meningkatkan profil kota. Dampak Ekonomi, Pembangunan Alun-Alun mendorong aktivitas

ekonomi lokal, meningkatkan bisnis seperti restoran, kafe, dan toko cendera mata di sekitarnya. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata.

Tantangan atau hambatan yakni perbedaan kepentingan antar fraksi di DPRD sering memicu debat panjang sebelum mencapai kesepakatan anggaran. Kepentingan politik dapat mempengaruhi alokasi dana, terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Aspek administratif ialah proses birokrasi yang kompleks dan waktu yang panjang memperlambat perumusan dan pelaksanaan anggaran. Pembatasan anggaran menjadi kendala dalam penyusunan dan pelaksanaan proyek. Aspek teknis ialah masalah kontur tanah yang tidak stabil dan kondisi lokasi pembangunan mempengaruhi teknis pelaksanaan proyek. Penambahan biaya untuk masalah teknis yang tidak terduga belum diperhitungkan secara optimal dalam perencanaan anggaran.

6.2 Rekomendasi/Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi/saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan/pengelolaan terkait penelitian tentang Politik Anggaran Dalam Penetapan Kebijakan Pembangunan Alun-Alun Kota Depok Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. **Peningkatan Akses Informasi di Media Berita:** Penting untuk meningkatkan ketersediaan dan kejelasan informasi terkait pembangunan Alun-Alun Kota Depok di berbagai media berita. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan media, serta memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik mencakup rincian yang komprehensif tentang anggaran, rencana pembangunan, dan tahapan implementasi.
- b. **Transparansi Data:** Transparansi dalam penyampaian data oleh narasumber, seperti DPRD Kota Depok dan Bappeda Kota Depok, harus lebih ditingkatkan. Pemerintah daerah perlu mengadopsi kebijakan keterbukaan informasi yang lebih kuat, memastikan bahwa data yang relevan tersedia dan dapat diakses oleh peneliti serta masyarakat. Hal ini tidak hanya akan mendukung penelitian yang lebih akurat tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan kebijakan.

- c. **Pengelolaan Waktu dan Jadwal:** Mengingat keterbatasan waktu narasumber dan perubahan jadwal penelitian akibat masa kampanye, disarankan untuk menyusun rencana penelitian yang lebih fleksibel. Peneliti dan narasumber harus berkomunikasi secara lebih efektif dalam menyusun jadwal wawancara atau pengumpulan data agar tidak terganggu oleh agenda politik atau kampanye. Selain itu, penetapan periode penelitian yang menghindari masa kampanye dapat mempertajam fokus dan kualitas data yang diperoleh.
- d. **Peningkatan Kolaborasi Antara Stakeholder:** Penelitian ini juga menunjukkan perlunya peningkatan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat sipil. Dengan menjalin kerja sama yang lebih erat, dapat dihasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau seperti Alun-Alun Kota Depok.
- Melalui penerapan rekomendasi ini, diharapkan kebijakan pembangunan Alun-Alun Kota Depok dapat lebih efektif, transparan, dan akuntabel, serta dapat memenuhi harapan masyarakat secara lebih baik.

